

**Koran Tempo, Senin, 1 September 2003**

Aniceto Guterres, Ketua Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste

## **"Kemerdekaan Kami Akan Hilang Jika Tersandera Masa Lalu"**

Kegigihan para warga Timor Leste untuk membentuk Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste) bukan upaya sia-sia. Pendirian itu didasarkan keyakinan dan pengalaman hidup untuk menata masa depan lebih baik. Alasan itu pun mendapat penegasan dari rakyat Timor Leste dan pemerintahannya sehingga menjadi tonggak sejarah lahirnya negara baru Timor Leste.

Sebenarnya bagaimana komisi ini bekerja dan apa agenda kerja yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengungkap kebenaran sejarah masa lalu dan melakukan rekonsiliasi demi masa depan? Berikut penuturan Aniceto Guterres kepada Koran Tempo di kantornya, Dili, Timor Leste, akhir Juli lalu.

### **Bisa dijelaskan, apa motivasi pembentukan komisi ini?**

Setiap bangsa punya kebutuhan sendiri. Saya tak mengatakan Indonesia perlu atau tidak, tapi menurut saya, penting bagi suatu bangsa untuk mengetahui kebenaran. Baik itu kebenaran sejarah atau apa pun untuk terus memperbaiki diri dan maju ke depan.

Pikiran seperti itu juga dimiliki Timor Leste awal 2000. Kami melihat gejala bahwa kemerdekaan yang kami peroleh hilang dengan sendirinya jika kami terbelenggu dengan masa lalu. Akhirnya kami sepakat perlu ada Komisi Kebenaran yang tak hanya penting untuk membuat klarifikasi soal pelanggaran HAM tapi juga klarifikasi sejarah. Sebab, sampai memenangkan kemerdekaan masih ada dua kutub pendapat, pro kemerdekaan dan protonomi. Demikian juga pengungsi masih juga ada di Indonesia.

### **Saat membentuk komisi ini, apakah Anda juga melakukan studi banding ke negara lain?**

Ya, misalnya ke Filipina dan juga mengundang kawan-kawan dari Afrika Selatan. Lalu International Center for Transitional Justice yang dikenal berpengalaman luas dalam membantu memfasilitasi negara-negara lain dalam membentuk Komisi Kebenaran seperti di Guatemala, Gaman, Sierra Leonar, Peru, dan lain-lain.

### **Apa perbedaan komisi ini dengan Komisi Kebenaran di negara-negara lain?**

Mandat pertama komisi ini sama dengan semua komisi kebenaran di negara lainnya, yaitu mencari kebenaran. Tugas kedua ini sekaligus tugas khusus untuk Timor Leste, yaitu memfasilitasi rekonsiliasi pemerintah. Karena itu, kami harus memfasilitasi proses rekonsiliasi pemerintahan langsung di tingkat masyarakat khususnya untuk kejahatan-kejahatan ringan. Tapi pelanggaran itu dilihat dari kualitas peristiwanya.

Selain itu, komisi juga bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat sehingga semua orang saling menerima. Baik dari kelompok protonomi, prokemerdekaan, milisi, dan lain sebagainya. Terakhir, kami melaporkan temuan-temuan dan merumuskan rekomendasi, termasuk soal perbaikan sistem politik, penegakan HAM, dan juga kompensasi para korban.

**Bagaimana dengan rekomendasi, apakah bersifat mengikat pemerintah untuk melaksanakannya?**

Sama dengan komisi di negara lain, secara hukum tak mengikat. Kami berharap ada semacam kemauan politik terutama dari pemerintah untuk melaksanakannya. Komisi sendiri tidak bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa rekomendasi ini misalnya akan dilaksanakan. Pemerintah yang melaksanakannya. Sampai tahap rekomendasi, bagi kami, kebenaran sudah di tangan.

**Ada tiga dari 10 tema kerja Komisi yang dimajukan ke depan publik, di antaranya soal kesaksian tahanan politik, korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual dan korban pengungsian dan kelaparan. Apa jaminan yang diberikan komisi sehingga saksi bersedia bicara terbuka?**

Pada public hearing kesaksian menjadi metode tersendiri untuk mencari kebenaran. Mereka datang secara sukarela. Kami tak memberikan komisi apa pun kecuali memfasilitasi biaya transportasi dan akomodasi. Sebenarnya ini proses penyembuhan bagi korban karena selama ini penderitaan disimpan dalam hati. Dengan menceritakan di hadapan publik seperti ini, menghilangkan beban.

**Kesaksian itu menyebut sejumlah nama dan organisasi seperti TNI. Bagaimana komisi mengklarifikasikan?**

Kami masih mencari korban dan saksi-saksi baru minta klarifikasi. Kami punya kekuasaan untuk memanggil siapa saja. Untuk memanggil TNI pun juga boleh karena kekuasaan ini dikukuhkan dalam konstitusi. Kami punya kekuasaan subpoena (panggil paksa). Siapa saja bisa kami panggil.

**Termasuk orang atau lembaga di luar wilayah Timor Leste?**

Itu yang jadi soal. Dalam UU Pembentukan Komisi, wilayah operasi komisi hanya Timor Leste. Di luar itu harus izin dari presiden. Tapi persoalannya tak hanya soal izin tapi juga masalah politik. Jangankan komisi yang punya kekuasaan subpoena, institusi Kejaksaan yang punya otoritas saja masih mentok. Jangankan Komisi, pemerintah saja tak bisa karena masalah politiknya lebih besar. Namun, karena komisi independen dan imparial, kesempatan tetap kami berikan kepada setiap pelaku. Kerugian bagi pelaku tidak menggunakannya. Apalagi kalau sudah diminta dan tidak datang.

**Apakah komisi juga melibatkan sejumlah ahli mengingat pengungkapan kebenaran ini dimulai dari 1975?**

Kejadian itu dimulai dari 1974 sampai 1999. Siapa saja yang punya data dan informasi itu, kami punya kekuasaan untuk melakukan submission. Metode lainnya, kami juga meriset untuk masing-masing tema, termasuk struktur militer Falintil dan TNI waktu itu untuk melihat pertanggungjawaban. Juga, riset soal konflik partai politik. Sekarang kami juga sedang melakukan pendataan batu nisan untuk mengidentifikasi berapa orang yang mati sepanjang 1974 sampai sekarang, termasuk kasus-kasus pembantaian seperti Santa Cruz.

**Maria Hasugian**

KCM, Senin, 13 Oktober 2003, 7:30 WIB

## **Pemerintah Timtim Ingin Lanjutkan Temu Rekonsiliasi**

### **Atambua, Senin**

Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur (Timtim) masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pertemuan rekonsiliasi antarwarga Timtim di tapal batas walaupun masyarakat eks pengungsi menolak mengikuti kegiatan tersebut.

"Pemerintah Timtim tetap berusaha agar temu rekonsiliasi antarwarga Timtim dilanjutkan. Sedangkan mengenai penolakan eks pengungsi untuk hadir pada pertemuan itu, Pemerintah Timtim berusaha mencari jalan keluar," kata Wakil Bupati Belu, Drs Bria Yohanes di Atambua, Senin (13/10).

Menurutnya, keinginan Pemerintah Timtim itu diketahui dari Kepala Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) di Dili, Edy Setia Budi yang pada Jumat (10/10) datang ke Atambua menemuinya untuk membahas kelanjutan temu rekonsiliasi.

Pemerintah Timtim akan menyelenggarakan pertemuan persiapan rekonsiliasi di Dili pada 15-16 Oktober yang juga dihadiri utusan pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang sejak September 1999 menampung eks pengungsi Timtim.

Diharapkan pada kesempatan pertemuan itulah dilakukan evaluasi agar Pemerintah Timtim dapat mengetahui alasan penolakan eks pengungsi. Ia memahami sikap eks pengungsi yang menolak hadir pada pertemuan rekonsiliasi di tapal batas Timtim, karena melihat ada perbedaan pandangan tentang rekonsiliasi dari Presiden Xanana, dengan para pejabat dan politisi Timtim lainnya.

Masyarakat eks pengungsi juga belum melihat sikap yang tulus dari saudara-saudara di Timtim dalam menerima mereka pulang ke tanah kelahiran.

Cukup banyak eks pengungsi yang setelah tiba di kampung halaman langsung dipukul atau diusir kembali ke NTT karena dendam politik masa lalu. "Jika Pemerintah Timtim mengundang Pemkab Belu menghadiri

pertemuan persiapan rekonsiliasi di Dili maka hal ini akan kami sampaikan kepada peserta pertemuan agar ada perubahan sikap dari pemerintah dan rakyat Timtim dalam memandang rekonsiliasi," ungkapnya.

Jadwal pertemuan rekonsiliasi yang diberikan Pemerintah Timtim sebanyak 15 kali terhitung sejak 22 Agustus hingga 27 November, eks pengungsi baru mengikuti satu kali pertemuan yang berlangsung di Salele, Distrik Covalima pada 22 Agustus lalu. "Pemerintah Timtim menyadari kebuntuan pertemuan rekonsiliasi antarwarga Timtim itu sehingga mereka merencanakan menggelar pertemuan evaluasi rekonsiliasi di Dili pada 15-16 Oktober nanti," demikian Bria Yohanes. **(Ant/ima)**